

**KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)  
DENGAN ADANYA PERJANJIAN PENGADAAN BARANG  
PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG**

**TESIS**

*Guna Memenuhi Sebahagian Persyaratan Mencapai Gelar  
Magister Kenotariatan Program Studi Magister Kenotariatan*



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2018**

**KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)  
DENGAN ADANYA PERJANJIAN PENGADAAN BARANG PUBLIK  
PADA DINAS PEDIDIKAN KOTA PADANG**

(Mira Handayani, NRM. 1420123028, Program Studi Magister  
KenotariatanFakultasHukum  
UniversitasAndalas, Padang, 118 halaman)

**ABSTRAK**

Keterlibatan pemerintah dalam suatu hubungan kontraktual berbeda dengan kontrakko mersial pada umumnya, karena karakteristik dari kontrak ini tidak murni hukum perdata, tetapi sudah ada campuran hukum publik di dalamnya. Keterlibatan pemerintah dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, menunjukkan tindakan pemerintah tersebut diklasifikasikan dalam tindakan pemerintahan yang bersifat keperdataan. Hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia yang terjadi pada proses penandatanganan perjanjian pengadaan barang dan jasa sampai dengan proses berakhirnya perjanjian merupakan hubungan hukum perdata khususnya hubungan kontraktual. Dalam proses perjanjian pengguna barang dan jasa adalah pemerintah yang diwakili oleh Pengguna Anggaran atau Kuasanya atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pengadaan atau ULP sebagai individu. Berkaitan dengan itu, permasalahan penelitiannya adalah bagaimana kedudukan hukum surat perintah kerja (SPK) dengan adanya perjanjian pengadaan barang publik dan bagaimana hubungan kontraktual antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia barang dan jasa untuk pengadaan barang public pada Dinas Pendidikan Kota Padang. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis empiris. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran, bahwa kedudukan hukum SPK, disamping merupakan bagi dan darikontrak dia juga merupakan putusan tata usaha negara dalam menjalankan kewenangan publik berupa pengadaan barang dan jasa yang dianggap melalui keuangan negara. Dalam padainya hubungan kontraktual parapihak, pada dasarnya sama halnya dengan kontrak kata uperjanjian pada umumnya. Artinya, kontrak mengikat parapihak seperti undang-undang yang berada dalam suatu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban.

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Surat Perintah Kerja dan Perjanjian Pengadaan

**POSSIBILITY OF LEGAL WORK ORDER WITH THE  
PROVISION OF PROCUREMENT OF PUBLIC GOODS AT THE  
DEPARTMENT OF PADANG CITY EDUCATION**

(Mira Handayani, NRM. 1420123028, Master Program of Faculty of Law  
Notary  
University of Andalas, Padang, 118 pages)

**ABSTRACT**

Government involvement in a contractual relationship is different from commercial contracts in general, because the characteristics of this contract are not purely civil law, but there is already a mixture of public laws in them. The involvement of the government in the procurement contracts of goods and services shows that the government's actions are classified into civil administration actions. The legal relationship between the user and the provider occurring in the process of signing the procurement agreement of goods and services up to the process of termination of the agreement is a civil law relationship, especially the contractual relationship. In the process of user and service user agreement is the government represented by Budget User or Proxy or Committing Officer (CO) or Procurement Official or ULP as an individual. Related to that, the research problem is how the legal status of work order (SPK) with the public procurement agreement and how the contractual relationship between the Committing Officer (PPK) with the provision of goods and services for the procurement of public goods at the Education Office of Padang City. The problem approach used is empirical juridical. From the result of the research, it can be seen that the position of SPK law, besides being part of the contract, it is also the decision of state administration in carrying out public authority in the form of pengadbarang and services which is violated through the state finance. In the meantime the contractual relations of the parties, basically the same as the contract or agreement in general. That is, the contract is binding on the parties such as laws that are in a lawful relationship and obligations.

Keywords: Legal Status, Work Order and Procurement Agreement.